

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Aktivitas Implementasi Kebijakan Program Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor.

Implementasi kebijakan menjadi hal penting dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang dijelaskan oleh van meter van horn (1975) dalam (Rusdiyanta, *et al.* 2022) terdapat enam variabel dalam melakukan implementasi suatu kebijakan. Dalam satgas pelajar kota. Bogor peneliti menemukan hasil bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SK Wali Kota. Bogor Tahun 2020 tentang Satuan Tugas (satgas) pelajar kota. Bogor memenuhi keenam variabel tersebut:

- a) Tujuan dan sandar kebijakan, kedua hal ini sangat penting untuk diketahui dari hadirnya sebuah kebijakan. Tujuan dan sasaran dalam sebuah kebijakan harus dipertimbangkan agar tidak mengalami kegagalan. Dalam organisasi satgas pelajar kota. Bogor hadirnya kebijakan SK Wali Kota memperkuat satgas pelajar dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada kalangan pelajar bersama dengan stakeholder seperti Dinas Pendidikan, kepolisian, koramil, kecamatan, dan organisasi masyarakat.. Dengan kebijakan Sk Wali Kota. Bogor semua memiliki tujuan dan SOP kerja yang sama sehingga dapat mempermudah satgas pelajar kota. Bogor dalam mencapai tujuan mencapai lingkungan kondusif sehingga pelajar kota. Bogor mendapat rasa aman dan terhindar dari tindakan penyimpangan perilaku remaja.
- b) Sumber daya kebijakan, sumber daya menjadi hal penting dalam proses implementasi kebijakan baik itu sumber daya manusia sebagai pelaksana maupun sumber anggaran yang diterima oleh satgas pelajar

kota. Bogor karena hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan suatu kebijakan. Dari hasil wawancara peneliti menemukan dalam satgas pelajar kota. Bogor sumber anggaran yang diterima masih berasal dari anggota (sekolah-sekolah yang bergabung) tidak adanya dana tetap yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan anggota satgas pelajar kota. Bogor berisikan orang-orang yang ahli dalam bidangnya baik anggota maupun organisasi/lembaga yang terlibat memiliki peran sesuai dengan bidang ahlinya. Anggota yang diutus dari sekolah berasal dari kalangan guru baik itu kemahasiswaan, pembina osis yang memiliki kedekatan atau hubungan lebih dekat dengan pelajar dan ditugaskan langsung oleh kepala sekolah. Dalam mendukung kegiatan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar melalui satgas pelajar kota. Bogor memiliki fasilitas ruang kesekretariatan yang dilengkapi dengan peralatan kerja/ATK (Alat Tulis Kantor) menunjang kegiatan surat menyurat dan tugas-tugas lainnya seperti menjadi ruang rapat anggota, serta alat bantu dalam koordinasi dan komunikasi yaitu HT (*Handy Talky*).

c) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, kebijakan tidak akan efektif apabila tidak ada keterlibatan para stakeholder terkait dalam mencapai tujuan. Komunikasi antar organisasi merupakan hal yang kompleks dalam suatu organisasi. Dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar, satgas pelajar kota. Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari kecamatan, polsek, Polresta, dinas pendidikan, KCD wil. 11 serta organisasi-organisasi yang peduli dengan penyimpangan perilaku di dalam dunia pendidikan seperti Gapenta, PPM, Bakoma dll. Proses mekanisme pengangkatan sumber daya manusia dalam satgas pelajar kota. Bogor sudah tercatat dalam AD/ART satgas pelajar kota. Bogor.

d) Karakteristik dari agen pelaksana, karakter dapat dilihat dari struktur organisasi dan atribut yang dimiliki oleh anggota. Hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa karakter dari anggota satgas pelajar kota. Bogor setiap anggota memiliki tanda pengenal yang sah yaitu KTA (Kartu Tanda Anggota) dan seragam sebagai atribut tanda pengenal anggota satgas pelajar kota. Bogor saat bertugas. Untuk menjadi anggota satgas pelajar kota. Bogor tidak ada kriteria khusus tetapi para anggota yang terlibat di dalamnya memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar. Tidak hanya rasa tanggung jawab anggota satgas pelajar kota. Bogor juga memiliki keberanian dalam menghadapi anak yang terlibat dalam penyimpangan perilaku remaja.

e) Kecenderungan dari pelaksana, merupakan variabel yang menggambarkan sikap pelaksana kebijakan. Melihat seberapa baik kinerja pelaksanaan dalam mengimplementasi kebijakan. Dari hasil wawancara sampai saat ini satgas pelajar kota. Bogor menuai berbagai keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsinya, satgas pelajar kota. Bogor berhasil mengantisipasi tindakan-tindakan penyimpangan perilaku remaja hingga mendapatkan penghargaan dari disdik hingga stasiun TV (RCTI). Hadirnya satgas pelajar kota. Bogor berhasil menurunkan angka tindakan penyimpangan perilaku remaja di kota. Bogor. Keberhasilan dapat diraih karena anggota satgas pelajar kota. Bogor memiliki rasa loyalitas tinggi pada organisasi.

f) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, kondisi-kondisi merupakan variabel eksternal dari keberhasilan suatu kebijakan. Di kota. Bogor kondisi ekonomi, sosial dan politik mendukung satgas pelajar kota. Bogor dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku hal ini sangat di rasakan pada kondisi sosial dalam masyarakat membantu dengan melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kota. Bogor tidak hanya itu dalam ruang lingkup politik satgas pelajar juga

mendapat perhatian sehingga mendapat bantuan untuk mengajukan anggaran tetap ke pemerintah kota. Bogor. Dukungan yang diterima oleh satgas pelajar kota. Bogor tidak semua masyarakat mendukung hal ini berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang beragam.

5.2. Koordinasi dan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor.

Koordinasi bagian dari proses dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi, karena dengan adanya koordinasi di dalam suatu organisasi memiliki manfaat yang dapat membantu menghubungkan satuan-satuan organisasi ataupun dengan organisasi/lembaga luar organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan teori M. P. Follet dalam (Wirjana, B. R. 2007) terdapat prinsip-prinsip dalam koordinasi. Dapat disimpulkan terdapat empat prinsip yang berlaku pada koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja melalui satuan tugas (satgas) pelajar kota. Bogor.

a) Kontak langsung, koordinasi akan efektif apabila ada kontak langsung dalam proses koordinasi hal ini ditemukan dalam proses koordinasi yang terjadi di satgas pelajar kota. Bogor di mana komunikasi dan koordinasi ke bawah dilakukan secara tatap langsung. Komunikasi ini tidak dapat terlepas dalam satgas pelajar kota. Bogor terutama pada saat koordinasi antar sesama anggota satgas pelajar kota. Bogor dalam melakukan kegiatan. Kontak langsung tidak dapat dipisahkan dalam proses koordinasi seperti pada rapat koordinasi kontak langsung dipilih untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengambil keputusan. Serta pada saat menemukan tindakan penyimpangan perilaku remaja satgas pelajar kota. Bogor secara langsung menangani kasus agar dapat ditangani segera oleh pihak yang bersangkutan baik itu sekolah atau pihak kepolisian.

b) Mulai sejak awal, koordinasi dalam satgas pelajar kota. Bogor sudah terbangun sejak awal berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa satgas pelajar kota. Bogor mengundang para *stakeholder* untuk melakukan diskusi bersama terkait hal-hal yang berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan satgas pelajar kota. Bogor dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar kota. Bogor. Berdasarkan sejarah terbentuknya satgas pelajar kota. Bogor berawal pada diskusi informal guru-guru antar sekolah yang sepakat membentuk satgas dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku pada pelajar. Seiring waktu koordinasi dilakukan lebih sering dan intens pada setiap pergantian regulasi terdapat diskusi bersama satgas pelajar kota. Bogor dengan *stakeholder*, diskusi bersama merupakan pertemuan formal satgas pelajar kota. Bogor dengan para *stakeholder* mendiskusikan peraturan masing-masing menuju kesepakatan bersama. Lembaga yang aktif dalam rapat koordinasi ialah lembaga dan organisasi yang bekerja sama dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar seperti dinas pendidikan, polsek dan polresta, serta organisasi GAPENTA, BAKOMA, FKPPPI, dan PPM.

c) Relasi timbal balik, adanya timbal balik yang diterima oleh satgas pelajar dari organisasi/lembaga yang bekerja sama dengan satgas pelajar kota. Bogor. Dalam melakukan kegiatan satgas pelajar kota. Bogor mendapatkan dukungan penuh dari organisasi/lembaga dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar *stakeholder* berperan mendukung kegiatan satgas pelajar kota. Bogor dalam mencapai tujuan seperti menyiapkan materi dalam sosialisasi kenakalan remaja, membantu melakukan pembinaan terhadap pelaku tindakan penyimpangan perilaku remaja pada kalangan pelajar dan terlibat langsung dalam kegiatan seperti menjadi pemateri

sosialisasi, ikut serta secara aktif dalam patroli dan kontroling kota. Bogor dan memberikan pembinaan terhadap pelaku tindakan penyimpangan perilaku remaja. Hubungan satgas pelajar kota. Bogor dengan *stakeholder* tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi untuk mencapai kota. Bogor yang kondusif.

d) Kontinuitas, koordinasi dalam pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor berjalan secara terus menerus saat ini satgas pelajar kota. Bogor telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan regulasi yaitu Sk BPSS (Badan Permusyawaratan Sekolah Swasta), SK Dinas Pendidikan no. 800/126- Disdik 2013 dan Sk Wali Kota No. 420.45-803 tahun 2020. Koordinasi berjalan berlangsung secara terus menerus di mana terdapat alur koordinasi dalam menyampaikan laporan sehingga tidak adanya miss komunikasi di dalam pelaksanaan kegiatan. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin dalam satgas pelajar kota. Bogor yaitu setiap minggunya terdapat laporan dari satgas pelajar kota. Bogor kepada polresta kota. Bogor dan laporan kegiatan setiap bulan kepada pembina satgas pelajar kota. Bogor. Begitu juga dengan koordinasi secara langsung terdapat rapat koordinasi dan pertemuan silaturahmi yang dilakukan kurang lebih sebulan sekali.

5.2.1. Strategi Koordinasi.

Dalam melakukan koordinasi berdasarkan teori dari Patti & Resnick (1980) dalam (Krist-Ashman, K. K. & Hull, Jr. G. H. 2009) terdapat strategi yang dapat dilakukan agar proses koordinasi dapat berjalan dengan baik.

a) Menyediakan fakta terkait masalah yang ada. Hadirnya satgas pelajar kota. Bogor berasal dari adanya temuan-temuan tindakan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar. Penyimpangan perilaku remaja di

kalangan pelajar menjadi masalah karena tindakan ini sangat dekat dengan tindakan kriminal yang melanggar undang-undang seperti adanya penggunaan sjaam dan balapan liar hal ini mengganggu ketertiban masyarakat. Sekolah-sekolah sekota. Bogor dilibatkan karena ditemukan bahwa sekolah favorit sekalipun tetap ditemukan adanya tindakan penyimpangan perilaku remaja inilah yang menjadi perhatian para guru-guru sehingga membuat satuan tugas (satgas) untuk melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar ini terjadi.

b) Menawarkan opsi penyelesaian masalah. Satgas pelajar kota. Bogor menawarkan solusi dari adanya masalah terkait penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar yang sudah menjadi kekhawatiran banyak pihak. Berdasarkan hasil wawancara sejarah hadirnya satgas pelajar kota. Bogor ini berasal dari kegelisahan para pembina dan kesiswaan siswa saat banyaknya tindakan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar yang terjadi saat itu dibentuk lah satuan tugas (satgas) yang bertahan sampai sekarang dengan nama Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor yang diperkuat dengan hadirnya kebijakan Sk Wali Kota Tahun 2020 tentang Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor 2020 - 2024. satgas pelajar kota. Bogor awalnya hanya berdiri untuk SMK/STM satgas pelajar kota. Bogor berkembang menjadi opsi penyelesaian masalah kenakalan remaja se-kota Bogor dengan ruang lingkup lebih luas yaitu SMP, MTS, SMA, SMK dan MA.

c) Meminta izin mencoba solusi pada masalah yang ada, satgas pelajar kota. Bogor memiliki tugas melakukan pencegahan penyimpangan perilaku di kalangan pelajar. Mulai dari keanggotaan yang diisi oleh guru-guru yang memang berkaitan erat dengan para pelajar melakukan berbagai upaya pencegahan dengan bekerja sama dengan organisasi/lembaga lain dengan melakukan pencegahan penyimpangan perilaku pada pelajar (kenakalan remaja) meliputi kegiatan sosialisasi kenakalan remaja, *controlling* (pengawasan) lingkungan sekolah dan lingkungan yang berpotensi tindakan penyimpangan perilaku remaja, serta melakukan pembinaan terhadap pelajar yang disinyalir memiliki potensi memiliki potensi tindakan penyimpangan perilaku maupun perilaku tindakan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar sudah menjadi tugas dari satgas pelajar kota. Bogor. Pembinaan yang dilakukan oleh anggota satgas pelajar ialah memberikan pendidikan terkait nilai dan moral yang harus dimiliki seorang pelajar, memberikan motivasi dan mendukung pelajar dalam kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti ekstrakurikuler, dan memberikan arahan kepada pelajar yang terindikasi tindakan penyimpangan perilaku. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dengan lembaga maupun organisasi terkait seperti dinas pendidikan, kecamatan, pihak kepolisian tingkat polsek dan polresta, dan organisasi yang peduli terhadap penyimpangan perilaku.

d) Meminta izin membuat komite untuk keberlangsungan program satgas pelajar kota. Bogor. Setelah mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah setempat, kehadiran satgas pelajar kota. Bogor diakui oleh wali kota. Setelah dikeluarkannya SK Wali Kota. Bogor

No. 420. 45-803 setiap sekolah diwajibkan mengirimkan 1 (satu) perwakilan untuk menjadi anggota satgas pelajar kota. Bogor. Hal ini membuat keanggotaan satgas pelajar kota. Bogor mencakup seluruh bagian di kota. Bogor di mana terdapat enam wilayah kecamatan setiap wilayah kecamatan memiliki ketua koordinator.

e) Melakukan peningkatan peluang agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar. Setelah tindakan pre-emptif pihak Polresta kota. Bogor bekerja sama dengan satgas pelajar kota. Bogor dalam tindakan preventif. Tidak hanya dengan Polresta dalam ruang lingkup lebih kecil satgas pelajar kota. Bogor juga bekerja sama dengan pihak Polsek dengan wilayah sesuai kecamatan membantu dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar. Dengan bekerja sama dengan pihak berwenang hal ini meningkatkan peluang keberhasilan satgas pelajar kota. Bogor dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar.

f) Menarik nilai-nilai, etika atau keberatan sistem hingga sesuai dengan sistem tindakan dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja. Dalam pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor anggota memiliki nilai-nilai moral tersendiri karena berasal dari guru-guru yang didelegasikan oleh pihak sekolah. Nilai moral tersebut ialah berakhlak mulia dan berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Anggota satgas pelajar kota. Bogor berasal dari guru dinilai mampu menerapkan dan menanamkan kepada para pelajar.

Pemaparan materi yang disajikan dalam kegiatan-kegiatan satgas pelajar kota. Bogor disesuaikan dengan kasus penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar yang ditemukan di lapangan. Terdapat etika dalam pelaksanaan kegiatan satgas pelajar kota. Bogor yang sudah di atur dalam SOP kegiatan satgas pelajar kota. Bogor.

g) Meyakinkan sistem target, berdasarkan hasil wawancara di dapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan pencegahan penyimpangan perilaku melalui satgas pelajar kota. Bogor ini adanya pembagian tugas antara anggota satgas pelajar kota. Bogor dengan lembaga lain khususnya pihak kepolisian yang sudah di atur dalam SOP kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan sistem yang telah dibuat dan disepakati bersama.

h) Mengidentifikasi hasil yang dirasakan dari hadirnya satgas pelajar kota. Bogor, sejauh ini hasil satgas pelajar kota. Bogor dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja ialah penyelesaian kasus yang dapat di proses cepat karena adanya kepedulian dan koordinasi yang baik membuat lingkungan kota. Bogor dapat terkendali (konduusif). Menunjukkan hasil yang positif sehingga sampai saat ini satgas pelajar kota. Bogor masih menjadi organisasi yang dipercaya dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kota. Bogor.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi pelaksanaan koordinasi dalam satgas pelajar kota. Bogor selaras dengan teori Patti & Resnick (1980) dalam (Krist-Ashman, K. K. & Hull, Jr. G. H. 2009) berawal dari ditemukannya fakta masalah, menjadi opsi penyelesaian masalah sehingga satgas pelajar kota. Bogor menjadi pilihan dalam pencegahan penyimpangan perilaku di kota. Bogor.

Kegiatan-kegiatan preventif yang menjadi solusi dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja. Satgas pelajar kota. Bogor yang tersebar di seluruh kecamatan berdasarkan arahan wali kota. Bogor. Satgas pelajar kota. Bogor juga bekerja sama dengan pihak berwenang terkait tindak penyimpangan perilaku seperti kepolisian hal ini meningkatkan peluang memberikan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar. Adanya nilai-nilai moral yang dimiliki anggota. Satgas pelajar kota. Bogor menunjukkan hasil yang positif sehingga dinilai efektif dan bertahan sampai saat ini.

5.2.2. Ciri-ciri Koordinasi.

Dalam proses koordinasi menurut teori Handayaniingrat (2002) terdapat ciri-ciri di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses koordinasi satgas pelajar kota. Bogor terdapat ciri-ciri koordinasi tersebut.

- a) Adanya tanggung jawab berdasarkan hasil wawancara anggota satgas pelajar kota. Bogor memang memiliki tanggung jawab karena hal ini sudah menjadi hal wajib yang dimiliki oleh semua anggota hal ini dapat mendorong pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor berjalan dengan baik.
- b) Adanya suatu usaha kelompok dalam mencapai tujuan. Anggota satgas pelajar kota. Bogor sudah sadar akan pentingnya koordinasi di dalam suatu organisasi sehingga koordinasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik karena apabila tidak adanya kesadaran dalam koordinasi dapat menimbulkan masalah bagi organisasi.
- c) Konsep kesatuan tindakan di dalam pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor. Semua

organisasi/lembaga yang terlibat dalam kerja sama melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kalangan pelajar akan menjalankan perannya masing-masing. Kesatuan tindakan dalam satgas pelajar kota. Bogor disepakati bersama dengan membuat MOU seluruh anggota satgas pelajar kota. Bogor mengadakan workshop untuk menyusun program dan strategi dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar kota. Bogor.

d) Tujuan koordinasi pada setiap organisasi untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Seperti halnya dalam satgas pelajar kota. Bogor dalam mencapai tujuan lingkungan kondusif di kota. Bogor satgas pelajar kota. Bogor melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian baik tingkat kapolsek hingga polresta hal ini dilakukan karena tujuan tersebut tidak dapat tercapai apabila hanya bekerja sendiri membutuhkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak salah satunya ialah kepolisian.

Selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Handayani (2002) proses koordinasi memiliki empat ciri di dalamnya yaitu tanggung jawab, usaha kelompok, kesatuan tindakan dan tujuan koordinasi. Koordinasi memiliki pengaruh terhadap efektivitas organisasi hal ini didukung oleh penelitian Enadarlita & Asvio, N. (2019) Bahwa koordinasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam efektivitas organisasi begitu juga pada satgas pelajar kota. Bogor ditemukan hasil bahwa koordinasi memiliki pengaruh dalam keberhasilan mencapai tujuan.

5.2.3. Indikator Koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan satgas pelajar kota, bogor dan teori Handyaningrat (2002) keberhasilan koordinasi dapat diukur dengan 5 indikator. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses koordinasi dalam satgas pelajar kota. Bogor memenuhi kelima indikator tersebut.

a) Komunikasi, dalam proses koordinasi satgas pelajar kota. Bogor tidak terlepas dari adanya komunikasi antar anggota maupun antar organisasi/lembaga terkait. Dalam koordinasi satgas pelajar kota. Bogor dengan organisasi/lembaga saling memberikan informasi sehingga penanganan tindakan penyimpangan perilaku remaja dapat di cegah sedini mungkin. Alur informasi koordinasi dalam satgas pelajar kota. Bogor terdapat dua arah yaitu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Komunikasi dalam satgas pelajar kota. Bogor juga dipermudah dengan adanya teknologi penyampaian informasi berupa alat yaitu ht maupun media internet melalui *whatsapp group* sehingga komunikasi dapat dilaksanakan dengan mudah.

b) Kesadaran pentingnya koordinasi, berdasarkan hasil wawancara di dalam satgas pelajar kota bogor. Tingkat kesadaran anggota terhadap pelaksanaan koordinasi cukup baik anggota satgas pelajar kota. Bogor selalu saling berkoordinasi hanya saja untuk satgas internal tidak semua anggotanya melakukan koordinasi dengan baik. Adanya tingkat ketaatan pada anggota satgas pelajar kota. Bogor dalam melakukan koordinasi hal ini mendukung proses koordinasi berjalan baik dan terarah mulai dari kegiatan di lapangan hingga hasil kegiatan dalam bentuk laporan terkoordinir dengan baik. Tidak hanya itu dalam satgas

pelajar kota. Bogor menerapkan informasi terpusat terkait seluruh kegiatan satgas pelajar kota. Bogor, informasi berjalan dengan satu arahan atau bisa dikatakan satu komando.

c) Kompetensi partisipan, berdasarkan hasil wawancara satgas pelajar kota. Bogor ini di pantau oleh pihak-pihak berwenang dalam dunia pendidikan seperti dinas pendidikan kota. Bogor, KCD wil II, dan para pembina pengurus satgas pelajar kota. Bogor. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d) Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dalam satgas pelajar kota. Bogor berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan di dalam satgas pelajar kota. Bogor sudah di atur dan memiliki SOP dalam pelaksanaannya baik itu untuk kegiatan satgas internal maupun satgas eksternal. Tugas satgas internal ialah “Berkoordinasi dnegan guru bimbingan konseling (BK) melakukan bimbingan melalui aktivitas siswa untuk tindakan preventif pencegahan penyimpangan perilaku pelajar secara berkala di sekolah” kegiatannya biasanya pemberian sosialisasi dan motivasi kepada siswa agar dapat memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang positif. Dan tugas dari satgas eksternal “Melakukan pemantauan di seluruh wilayah kota. Bogor khususnya pada titik-titik rawan perkelahian antar pelajar dalam membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan pelajar di kota. Bogor” Dalam menjalankan tugas satgas eksternal aktif bekerja sama dengan pihak kepolisian pad ruang lingkup kecamatan bekerja sama dengan polsek dan

ruang lingkup sekota maka satgas bekerja sama dengan Polresta. Bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang telah disepakati dalam satgas pelajar kota. Bogor anggota tersebut dapat dikeluarkan dari organisasi satgas pelajar kota. Bogor. Pelaksana kebijakan satgas pelajar kota. Bogor tidak ada insentif bagi anggota maupun organisasi/lembaga yang ikut serta mendukung kegiatan-kegiatan satgas pelajar kota. Bogor.

e) Kontinuitas dalam satgas pelajar kota. Bogor dapat berjalan karena adanya umpan balik yang diberikan oleh organisasi/lembaga yang bekerja sama dengan satgas pelajar kota. Bogor. Satgas pelajar kota. Bogor tetap bertahan dari dulu hingga sekarang dengan beberapa kali pergantian regulasi, untuk saat ini kesepakatan dalam satgas pelajar kota. Bogor tidak ada pembaharuan terakhir kesepakatan dibuat pada tahun 2020 masih berlaku hingga saat ini karena dinilai masih sesuai dengan masa ini sehingga belum diperlukan pembaharuan peraturan.

Satgas pelajar kota. Bogor memiliki tugas dan fungsi salah satunya ialah “Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, komando rayon militer, satuan polisi pamong praja dan bintara pembina desa di wilayah kota. Bogor jika terjadi tindakan penyimpangan perilaku yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal dan membahayakan orang lain untuk meminimalisir jatuhnya korban.” koordinasi menjadi hal penting dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja melalui satgas pelajar kota. Bogor. Berdasarkan teori Handyaningrat (2002) Satgas pelajar kota. Bogor memenuhi indikator keberhasilan koordinasi yaitu adanya informasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi,

kompetensi partisipan, kesepakatan/komitmen/insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan.

5.2.4. Komunikasi Dalam Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan juga teori yang digunakan yaitu teori Liliweri, Alo. (2014) metode komunikasi yang dilakukan dalam satgas pelajar kota bogor.

- a) Komunikasi tertulis, dalam pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor menggunakan surat. Dari proses mekanisme pengangkatan anggota satgas pelajar kota. Bogor menggunakan Surat Keputusan (SK) penugasan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah masing-masing. Tidak hanya itu saat mengadakan pertemuan-pertemuan satgas pelajar kota. Bogor menggunakan surat dalam mengundang organisasi/ lembaga dari luar satgas pelajar kota. Bogor.
- b) Komunikasi lisan, komunikasi ini tidak terlepas dari proses koordinasi karena komunikasi ini merupakan komunikasi yang paling sering dilakukan dalam berbagai situasi serta mengurangi adanya penyampaian kesalahpahaman pesan yang disampaikan terutama dalam membuat keputusan-keputusan bersama.
- c) Komunikasi nonverbal, komunikasi ini dilakukan oleh satgas pelajar kota. Bogor dalam situasi dan kondisi tertentu saja seperti pada situasi merazia pelajar yang terindikasi adanya penyimpangan perilaku remaja.
- d) Media elektrik, dari hasil wawancara dapat disimpulkan dalam melakukan komunikasi satgas pelajar kota. Bogor memanfaatkan media *whatsapp* dalam

mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor.

5.2.5. Arah Aliran Komunikasi Dalam Organisasi.

Hasil penelitian pada proses koordinasi satgas pelajar kota. Bogor alur komunikasi dalam satgas pelajar kota. Bogor terbagi menjadi tiga alur yaitu;

- a) Komunikasi ke bawah, aliran ini dilakukan dalam proses koordinasi dan komunikasi yang informasi bersumber dari atasan untuk anggota biasanya komunikasi ini dilakukan dalam bentuk sebuah instruksi kerja ataupun informasi yang berasal dari atasan.

Alur komunikasi ke bawah yang terjadi di dalam satgas pelajar kota. Bogor terjadi apabila terdapat instruksi kerja ataupun informasi terkait kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan satgas pelajar kota. Bogor maka berasal dari atas (ketua umum) yang disampaikan kepada ketua harian sebagai pelaksana di lapangan, lalu informasi akan terus berjalan ke bawah seperti pada susunan struktur organisasi sampai pada akhirnya instruksi kerja maupun informasi sampai kepada seluruh anggota satgas pelajar kota. Bogor dan kepada siswa/pelajar bila perlu.

- b) Komunikasi ke atas, aliran ini dilakukan dalam proses koordinasi dan komunikasi yang berasal dari anggota untuk atasan. Biasanya komunikasi ini dilakukan saat adanya informasi terkait kegiatan di lapangan maupun laporan hasil kerja anggota satgas pelajar kota. Bogor

dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja di kota. Bogor. Melaporkan hasil kegiatan sudah menjadi tugas tertulis dalam Sk Wali Kota dimana satgas pelajar kota. Bogor “melaporkan hasil monitoring dari ketua umum Satgas pelajar kota. Bogor kepada Wali kota. Bogor melalui kepala dinas pendidikan kota. Bogor, kepala kantor kementerian agama kota. Bogor dan kepala kantor cabang dinas wilayah II provinsi Jawa Barat.”

Komunikasi ke atas biasanya dalam bentuk laporan dan surat kepada atasan. Komunikasi di mulai dari kejadian di lapangan yang di temukan oleh satgas pelajar kota. Bogor lalu diproses mulai dari tindakan preventif sampai tindakan represif apabila terjadi tindak penyimpangan perilaku pada pelajar. Setiap harinya anggota yang bertugas dalam kegiatan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar baik pada kegiatan sosialisasi di setiap sekolah hingga kegiatan patroli anggota melaporkan hasil kegiatan ke sesama anggota sampai ketua umum.

Alur laporan kegiatan disampaikan melalui grup whatsapp setiap harinya, laporan tidak hanya berhenti pada grup whatsapp anggota tetapi juga pada ruang lingkup wilayah sekota Bogor. Selain laporan harian anggota dan koordinator wilayah (kecamatan) setiap bulannya membuat laporan yang dikumpulkan kepada satgas pelajar kota. Bogor setiap bulan untuk menjadi bahan evaluasi satgas pelajar kota. Bogor.

- c) Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antar sesama anggota. Satgas pelajar kota. Bogor

terbagi menjadi dua bagian yaitu satgas internal dan satgas eksternal. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar di kota. Bogor. Keduanya harus berjalan beriringan agar dapat mencapai tujuan, sehingga komunikasi antar anggota menjadi hal yang penting pada koordinasi dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi antar anggota tidak dapat dipisahkan satgas eksternal dan satgas internal saling berkaitan sehingga selalu melakukan komunikasi menghindari *miss communication* sehingga walaupun memiliki tugas yang berbeda seluruh anggota mengetahui seluruh kegiatan yang ada di dalam satgas pelajar kota. Bogor tanpa terkecuali. Tidak hanya untuk dalam proses koordinasi terkait tugas dan fungsi satgas pelajar kota. Bogor dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar. Komunikasi keduanya selalu terjalin, komunikasi antar anggota menjadi hal penting guna keberlangsungan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian alur komunikasi pada proses koordinasi ditemukan tiga alur komunikasi yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Ivancevich (2007) dalam (Silviani, I. 2020) alur komunikasi terbagi menjadi lima yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal dan komunikasi eksternal.

5.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyimpangan Perilaku Remaja Melalui Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor.

Berdasarkan teori (Hasibuan, S. P. 2011) dalam proses koordinasi terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi koordinasi, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa keempat faktor yang dikemukakan Hasibuan, S.P (2011) merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan koordinasi. Maka dapat disimpulkan koordinasi dapat berjalan baik karena adanya pengaruh dari baiknya proses koordinasi dalam satgas pelajar kota. Bogor.

- a) Faktor pendukung koordinasi yang pertama, adanya kesatuan tindakan baik antar anggota satgas pelajar maupun dengan pihak yang bekerja sama dengan satgas pelajar kota. Bogor.
- b) Adanya komunikasi dalam setiap proses koordinasi setiap anggota satgas pelajar kota. Bogor memegang HT sebagai alat bantu komunikasi hal ini mempermudah penyampaian informasi kepada seluruh anggota satgas pelajar kota. Bogor.
- c) Adanya pembagian kerja sebagai suatu usaha dalam mencapai tujuan. Dalam satgas pelajar kota. Bogor pembagian kerja terbagi menjadi satgas internal dan satgas eksternal, satgas internal berfokus pada pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar dalam ruang lingkup sekolah sedangkan satgas eksternal merupakan pasukan inti yang bertugas di luar sekolah.
- d) Disiplin menyangkut sikap dan tingkah laku pelaksana yang dapat menghasilkan hasil yang baik apabila tingkat kedisiplinan pelaksana baik. Dalam satgas pelajar kota. Bogor para pelaksana implementasi kebijakan koordinasi dan

komunikasi berjalan dengan baik, pelaksana implementasi kebijakan saling berkoordinasi dan memiliki alur komunikasi yang jelas didukung dengan perangkat komunikasi yang dapat menyampaikan informasi secara cepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari wawancara dan observasi ditemukan faktor-faktor penghambat.

- a) Tidak semua sekolah se-kota Bogor berperan aktif dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar terdapat beberapa sekolah yang masih kurang tanggap dengan situasi dan penanganan kasus penyimpangan perilaku remaja pada pelajar hal ini terjadi karena pihak sekolah merasa bahwa siswanya tidak terlibat masalah.
- b) Tidak adanya anggaran tetap dalam operasional kegiatan satgas pelajar kota. Bogor anggaran masih berasal dari pihak sekolah ditambah dari sumbangan anggota.
- c) Anggota satgas pelajar kota. Bogor yang bersedia untuk bergabung dalam satgas eksternal masih sedikit sehingga ada keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar se-kota bogor.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses koordinasi implementasi kebijakan pelaksanaan program satgas pelajar kota. Bogor ditemukan faktor pendukung koordinasi yaitu adanya kesatuan tindakan, adanya komunikasi, adanya pembagian kerja, dan disiplin. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak semua sekolah se-kota bogor berperan aktif dalam pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar, tidak adanya anggaran tetap, dan keterbatasan sumber daya manusia pada bagian satgas eksternal..